



Kerjasama Indonesia dengan North Atlantic Treaty Organization dalam Global Army Trade Tahun 2019-2024

Maulana Fasha Aralea^{1*}, Achdijat Sulaeman²

¹⁻² Universitas Al-Ghifari, Indonesia

² Universitas Ahmad Yani, Indonesia

email: fashaaralea747@gmail.com

Article Info :

Received:

26-10-2025

Revised:

26-11-2025

Accepted:

22-12-2025

Abstract

Indonesia is the most powerful country in Southeast Asia and the 13th in the world, according to research from Global Firepower and the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). However, Indonesia requires cooperation with other countries in military diplomacy on the international stage, while upholding the principle of an independent and active foreign policy. Therefore, Indonesia can collaborate with the North Atlantic Treaty Organization in global arms sales, including joint exercises. This research method uses qualitative research, which utilizes conditional observations on natural objects and data collection as explanatory information. The study results indicate that Indonesia can collaborate with North Atlantic Treaty Organization member states in defense development, such as the physical construction of the Minimum Essential Force (MEF) and Indonesia's role in joint exercises, with the caveat that Indonesia does not have an official relationship with NATO as a non-member country.

Keywords : Indonesia, North Atlantic Treaty Organization, Global Army Trade.

Abstrak

Indonesia merupakan negara terkuat pertama di Asia Tenggara dan ke-13 di seluruh dunia berdasarkan riset dari *Global Fire Power* dan *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), namun Indonesia memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam diplomasi militer ke kancan dunia Internasional di tengah memegang prinsip politik bebas aktif pada kebijakan luar negeri Indonesia. Sehingga Indonesia dapat bekerjasama dengan *North Atlantic Treaty Organization* dalam penjualan senjata global termasuk latihan gabungan bersama. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif di mana metode penelitian ini menggunakan meneliti pada kondisional pada objek alamiah serta pengambilan sebagai penjelasan informasi. Hasil penelitian bahwa Indonesia dapat bekerjasama dengan negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* dalam pengembangan pertahanan seperti pembangunan fisik *Minimum Essential Force* (MEF) beserta peran Indonesia dalam latihan gabungan dengan catatan bahwa Indonesia bersama NATO tidak memiliki hubungan resmi sebagai mitra negara non anggota.

Kata Kunci : Indonesia, North Atlantic Treaty Organization, Global Army Trade.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Menurut pengetahuan umumnya seperti Perdagangan Senjata Global atau di kenal sebagai *Global Army Trade* merupakan kerjasama antar negara secara dinamis di mana sejumlah kecil pemasok terutama berfokus pada laba yang dihasilkan dari penjualan senjata dan implikasi keamanan dari penjualan tersebut dan ada mayoritas pembeli terlibat dalam interaksi perdagangan senjata global yang memerhatikan peningkatan keamanan mereka di bandingkan para negara tetangga mereka secara regional (Levine & Smith, 1995) termasuk kerjasama transfer teknologi atau membeli suatu senjata yang dibutuhkan kepada negara lain dengan kesepakatan aktor negara seperti pemimpin negara dan menteri negara yang terlibat beserta aktor non negara seperti kontraktor perusahaan senjata dari negara terkait dengan memberikan model struktur pasar dalam industri senjata global yang menghubungkan pengadaan militer, perdagangan internasional, konsentrasi, dan konflik regional yang sementara dari aspek ekonomi perdagangan senjata dan analisis hubungan antara transfer senjata dan kebijakan luar negeri disediakan (Jan van Lieshout, et al, 2021).

Lalu dari perkembangan perdagangan senjata global terdapat dua sumber tradisional utama untuk menganalisis pasar perdagangan senjata adalah *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) dan *World Military Expenditure and the Arms Trade* (WMEAT) yang merupakan fasilitas dari *US Arms Control and Disarmament Agency* dan pembaruan departemen Luar Negeri Amerika Serikat seperti *Bureau of Verification and Compliance* di mana dari SIPRI bertugas menawarkan data tahunan tentang volume transfer sistem persenjataan utama sekaligus ukuran volume yang memperhitungkan kuantitas yang dikalikan dengan nilai indikator trend (bukan harga aktual) yang di bayarkan, lalu untuk WMEAT memberikan nilai transfer dengan mempertimbangkan harga yang sebenarnya di bayarkan termasuk senjata ringan (ACDA, 2000).

Perihal kontribusi Indonesia dalam kerjasama perdagangan senjata global pada tahun 2019-2024 bersama anggota negara organisasi pakta atlantik utara atau dikenal sebagai *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) bisa menjadikan sebagai peluang bagi Industri pertahanan di Indonesia sebagaimana yang tertulis pada UU No 16 tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan merupakan industri nasional strategis yang mampu menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau disebut senjata dan eksplisit pasal 4 UU ialah salah satu tujuan penyenggaraan industri pertahanan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi negara sekaligus penyerapan tenaga kerja sehingga industri pertahanan dapat dianggap sebagai industri dengan nilai tinggal secara sistem bisnisnya (Sutrimo Sumarlan, 2019).

Dari segi keadaan industri pertahanan milik Indonesia sendiri melalui PT. Pindad mampu memproduksi senjata keperluan infranti yang telah menguasai teknologi tinggi seperti contohnya ialah senapan SS-2 buatan Indonesia dengan 5.56 mm dapat berbagai pengalaman latihan militer pada kompetisi yang telah menjuarai menembak Internasional oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti partisipasi *ASEAN Army Rifle Meeting* (AARM), *Australian Army Skills at Arms Meeting* (AASAM) berkat pengadaan SS-2 (Sutrimo Sumarlan, 2019).

Hasil dari perlombaan *Australian Army Skills at Arms Meeting* (AASAM) di Australia pada partisipasi peran Indonesia mendapatkan juara sampai 7 kali sehingga Indonesia menang pada arena perlombaan yang di sediakan oleh pemerintah Australia serta Indonesia menang telak atas negara kekuatan besar yang di mana negara-negara lain terkenal dengan produsen senjata api, namun kemenangan tersebut mendapatkan respon negatif sekaligus meminta senjata SS-2 di minta bongkar secara total (Reny Susanti, 2016). Di sisi lain dalam kemenangan perlombaan dengan bukti senjata buatan Indonesia dapat berjaya di arena perlombaan menembak skala Internasional yang ternyata tidak cukup terkenal banyak pada pasar penjualan senjata global bahkan Indonesia tertinggal jauh dalam daftar negara pengekspor sebagai Small Arms Top termasuk masih kalah jauh dengan Filipina (Sutrimo Sumarlan, 2019).

Menurut Lech Drab mengenai diplomasi pertahanan atau diplomasi militer merupakan sebuah istilah relatif baru dalam respon negara membutuhkan kekuatan pertahanan militer pasca Perang dingin dalam penamaan tugas-tugas baru termasuk pada fungsi internasional yang di lakukan oleh angkatan bersenjata serta arah kepemimpinan Kementerian Pertahanan Nasional. Namun pada pemahaman ini tidak boleh dipahami sebagai "Diplomasi Militer Tambahan" atau pemahaman setara lainnya di mana terdapat kurang definisi yang telah di akui secara universal tentang diplomasi militer yang mengartikan setiap negara dapat melakukan percobaan beradaptasi dengan kapasitasnya dalam kebijakan keamanan suatu negara sendiri (Lech Drab, 2018).

Kerja sama antara Indonesia (yakni pada Kementerian Pertahanan RI) dengan negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam diplomasi militer berbentuk perdagangan senjata global hingga peran Indonesia dalam mengadakan latihan bersama merupakan suatu bentuk Kerjasama Internasional yang melibatkan aktor negara aktif dari dua atau lebih melalui kedua kementerian pertahanan suatu negara sampai kepada kedua kelompok personel militer antar negara. Kerjasama antara Indonesia dengan negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) merupakan interaksi diplomasi militer yang bertujuan dalam peningkatan pembangunan militer fisik seperti *Minimum Essential Force* (MEF), pengenalan senjata lokal buatan PT. Pindah maupun tukar teknologi persenjataan, hingga kerjasama dalam latihan bersama antar negara sehingga baik Indonesia maupun negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dapat terjalin dengan hubungan erat di tengah Indonesia tetap mempertahankan posisi politik bebas aktif sebagaimana Indonesia tidak bergabung dengan aliansi militer apapun.

METODE PENELITIAN

Penggunaan preferensi jurnal menggunakan penelitian kualitatif di mana metode penelitian ini menggunakan meneliti pada kondisional pada objek alamiah dan penelitian ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan bahasa perhitungan statistik sosial berbasis matematika di mana penggunaan ini di ambil dari sampel data yang dapat memanfaatkan teori yang ada sebagai kejelasan informasi penelitian yang berakhir menjadi teori secara perbaruan. Berdasarkan penelitian kualitatif dari Moleong (2005:6) menyatakan bahwa ini merupakan penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh suatu subjek dalam sudut pandangan persepsi, tindakan, hingga motivasi secara holistik dalam di bungkus cara-cara deskripsi kata-kata beserta bahasa yang berkonteks khusus yang bermanfaat dari berbagai metode alamiah.

Dalam maksud penggunaan metode ini merupakan metode yang terus menggali informasi melalui skema pengumpulan, penyusunan, hingga penyocokan data-data atau interpretasikan data yang dapat di ajukan dalam menganalisis suatu fenomena sekaligus peran sebuah negara dalam menjalankan kerjasama terkait dalam kontek bagaimana diplomasi dapat berjalan. Sebuah Informasi yang telah di kumpulkan secara tingkat akurasi yang dapat di terima sebagai sebuah fakta yang termasuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di tengah interaksi diplomasi tersebut. Terakhir untuk penelitian dengan menganalisis data melalui referensi buku, artikel berita, jurnal, serta media sosial yang relevan dengan masalah di teliti bertujuan mengumpulkan informasi dengan tepat mengenai bagaimana peran Indonesia bekerja sama dengan negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam perdagangan senjata global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kerjasama Indonesia dengan North Atlantic Treaty Organization

Status negara Indonesia sebagai negara non-blok atau Non-Alignment sejak pada awal kemerdekaan bersamaan dengan Mesir, Yugoslavia, dan beberapa negara lain di tengah situasi fenomena pembentukan gerakan blok barat seperti Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau dikenal sebagai *North Atlantic Treaty Organization* maupun timur pada Pakta Warsawa (*Warsaw Pact*) (Major Richard W. B. Hutton, 2018).

Dalam kedua kubu di dunia tersebut bahwa Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dari pemahaman ideologi Pancasila sehingga Indonesia dapat berdiplomasi kedua kubu tanpa harus bergabung dari salah satu sisi, terutama sejarah kerjasama antara Indonesia dengan *North Atlantic Treaty Organization* melalui bilateral negara anggota tanpa melalui skema bergabung seperti negara-negara non-blok lainnya (Major Richard W. B. Hutton, 2018).

Di masa perang dingin dari era orde lama di mana Indonesia mempunyai hubungan erat baik dengan Amerika Serikat pada saat Presiden Sukarno menemui Presiden John F. Kennedy pada pertemuan langsung ke Amerika Serikat dalam berbagai diplomasi maupun dengan Uni Soviet saat bertemu dengan Presiden Khrushchev dalam kegiatan diplomasi negara di sisi blok timur atau Pakta Warsawa (Major Richard W. B. Hutton, 2018).

Hal ini menjadi perhatian besar bagi Amerika Serikat kepada Indonesia dalam misi kerjasama pertahanan dengan diplomasi militer setelah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1948 setelah Belanda menyerahkan teritori bekas Hindia Belanda ke Indonesia sebagai negara yang merdeka, pada tahun 1950 Amerika Serikat memberikan bantuan militer pertama kepada Indonesia seperti 50 unit walkie-talkies, 10 akses sistem alamat publik, beberapa teknologi kamera sidik jari, 50 truk, 50 kendaraan jeep, 50 sepeda motor, 21.000 senapan otomatis, 1.000 senapan otomatis kecil, 10.000 pistol, 100 senapan kejut (shotgun), 500 masket gas, serta amunisi pendukung untuk semua senjata pendukung di bandingkan hasil penyerahan Belanda (Major Richard W. B. Hutton, 2018).

Semua pemberian program ini di tunjukan kepada pemerintah Indonesia dalam menghadapi pemberontakan termasuk ancaman komunisme yang terjadi saat pemberontakan PKI oleh Muso di Madiun 2 tahun lalu dengan mendukung kekuatan militer Indonesia termasuk pelatihan dan program diplomasi militer, namun di tengah misi Amerika Serikat terdapat kedatangan Uni Soviet yang di pimpin oleh Khrushchev yang baru saja terpilih menghampiri negara-negara berkembang termasuk Indonesia dengan membawa pengaruh ideologi komunisme termasuk pengaruh militer (Major Richard W. B. Hutton, 2018).

Konsep Strategi NATO 2022 dalam situasi Asia-Pasifik

Pertemuan para negara-negara anggota dengan Organisasi Pakta Atlantik Utara (atau *North Atlantic Treaty Organization*) yang bertepatan pada kota Madrid (Spanyol) pada waktu krusial dalam pembahasan keamanan dan demi stabilitas beserta perdamaian skala internasional telah mengungkapkan Konsep Strategis terbaru dalam meyakini kepada para mitra negara yang tetap terjaga termasuk sumber daya negara masing-masing untuk persiapan masa depan selama 70 tahun terakhir, NATO telah memastikan kebebasan serta keamanan bagi para negara anggota berdasarkan kesuksesan hasil dedikasi dan pengorbanan baik wanita maupun pria dari angkatan bersenjata negara anggota dalam merangkul mereka bersama anggota keluarga yang menjadi dasar rasa syukur (NATO 2022 Strategic Concept, 2022).

Lalu dedikasi *North Atlantic Treaty Organization* dalam melindungi 1 miliar warga negara anggota untuk mempertahankan teritorial negara anggota, memberikan keamanan kemerdekaan, hingga ideologi demokrasi di buktikan dengan memperkuat kesatuan, kohesi serta solidaritas membangun jaringan ikatan antar negara anggota pada Transatlantik dengan nilai-nilai demokrasi sehingga komitmen negara anggota NATO dapat terlaksana secara matang dan terintegrasi untuk melindungi baik sesama negara anggota maupun negara lain di luar NATO dari segala ancaman tidak peduli dari mana mereka berasal. Maka seluruh negara anggota dapat bekerja sama dalam perdamaian inklusivitas dan melanjutkan peran benteng untuk tatanan dunia internasional yang bersifat aturan internasional termasuk mempertahankan perspektif perdamaian global maupun bekerja sama secara erat bersama dengan mitra negara anggota, negara lain, serta organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkontribusi keamanan dan perdamaian internasional (NATO 2022 Strategic Concept, 2022).

Pada dasar konsep ini bahwa sejatinya *North Atlantic Treaty Organization* terbentuk untuk kemerdekaan serta keamanan negara anggota dengan tanggung jawab besar untuk memastikan pertahanan kolektivitas dapat menghadapi segala ancaman dari semua arah sehingga pakta pertahanan *North Atlantic Treaty Organization* bersifat persekutuan defensif dengan konektivitas transatlantik antar negara anggota yang penting untuk keamanan bersama dalam keterikatan nilai-nilai sama antar anggota seperti supremasi hukum yang kuat, kebebasan individu, berideologi demokrasi, serta hak asasi manusia dengan berkomitmen kuat berdasarkan tujuan serta menganut prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (NATO 2022 Strategic Concept, 2022).

Bahkan untuk *North Atlantic Treaty Organization* sendiri dapat bersifat forum transatlantik unik, penting, hingga tidak tergantikan dalam berkonsultasi pertahanan, koordinasi, dan aksi dalam semua hal yang berkaitan dengan individualis dan keamanan kolektivitas sehingga dapat memperkuat antar negara anggota maupun negara mitra berdasarkan keamanan yang tidak dapat di pisahkan, solidaritas, dan komitmen kuat untuk saling melindungi sesama yang telah di tetapkan pada Artikel 5 dari *North Atlantic Treaty* di mana kemampuan bersama dalam pencegahan dan mempertahankan diri adalah sebuah komitmen *North Atlantic Treaty* sebagai tulang punggung organisasi ini (NATO 2022 Strategic Concept, 2022).

Selanjutnya dalam tiga penugasan inti yakni manajemen pencegahan dalam pertahanan, manajemen pencegahan dalam pengelolaan krisis yang terjadi, serta keamanan kooperatifnya menghasilkan kerjasama saling melengkapi dan memastikan baik keamanan kolektif maupun pertahanan untuk semua negara anggota termasuk meningkatkan ketahanan sebuah negara anggota secara kolektif dalam keunggulan teknologi yang dimiliki masing-masing negara anggota aktif. Dan dengan daya dukungan promosi tata kelola pemerintahan yang baik beserta integritas sistem bagi *North Atlantic Treaty Organization* merupakan sebuah implementasikan perubahan iklim, keamanan manusia serta wanita, perdamaian, dan agenda keamanan di antara semua tugas inti dan melanjutkan mendukung kesetaraan gender sebagai refleksi dalam nilai-nilai ini (NATO 2022 Strategic Concept, 2022).

Permasalahan Laut China Selatan yang di dominasi oleh ambisius Tiongkok bersama dengan kebijakan koersifnya yang membuat negara-negara ASEAN terutama pada Filipina, Malaysia, Vietnam, termasuk Indonesia menjadi sebuah ancaman yang masih belum di tanggap serius dan bagi Amerika Serikat pada domisili pulau Guam sebagai markas utama Angkatan Laut Pasifik melihat klaim Tiongkok atas laut China Selatan menjadi sebuah ancaman serius selain tensi Tiongkok-Taiwan bahkan mengancam nilai-nilai keamanan serta kepentingan regional ASEAN sebagai organisasi non-Intervensi (Patricia Kimball et al, 2024).

Dominasi Tiongkok menggunakan berbagai jenis strategi politik termasuk ekonomi serta pertumbuhan militer Tiongkok dengan proyeksi kekuatan lebih cepat dari rata-rata pembangunan global seperti kerjasama BRI (*Belt Road Initiative*) dari Tiongkok kepada negara-negara berkembang yang ikut dalam proyeksi Tiongkok untuk membangun kerjasama ekonomi regional tanpa adanya transparansi niat kepentingan Tiongkok sehingga berpotensi ada celah Tiongkok dapat mengklaim suatu wilayah seperti fenomena pada kepulauan *Sparly* dan *Paracel* yang telah dibangun menjadi markas militer multiperan oleh Tentara Pembebasan Tiongkok (Patricia Kimball et al, 2024).

Fenomena pembangunan secara serentak dan klaim sepihak ini membuat beberapa negara anggota ASEAN menjadi tensi dengan Tiongkok, seperti tensi Tiongkok dengan Filipina karena pulau kecil terluar milik Filipina terus di klaim oleh Tiongkok secara sepihak di saat sudah kalah persidangan dari Filipina saat mengajukan gugatan melalui kesepakatan UNCLOS. Sehingga ancaman Tiongkok ini menjadi perhatian besar bagi *North Atlantic Treaty Organization* di mana Tiongkok telah melakukan retorika konfrontatif langsung dengan menggunakan teknologi siber untuk melakukan penyebaran disinformasinya dengan menargetkan kepada negara mitra bahkan manuver bahaya bagi aliansi pada regional ASEAN, ditambah aksi Tiongkok dalam berupaya menjadi supremasi sektor teknologi dan industrialisasi regional termasuk dengan infrastruktur strategis dalam material pada pasokan rantai pasar global yang sibuk pada pelayaran Laut China Selatan (Patricia Kimball et al, 2024).

Kerjasama Pertahanan Militer

Kerjasama antara dua negara atau lebih untuk diplomasi militer yang menjadi sebuah keharusan sebuah negara dalam mempertahankan kedaulatan teritorial dari ancaman-ancaman luar manapun sehingga dalam konteks kerjasama Indonesia dengan *North Atlantic Treaty Organization* melalui negara anggota aktif tanpa bergabung kepada aliansi tersebut bertujuan memperkuat keamanan regional dan global selama negara Indonesia masih menganut sistem demokrasi yang sama dengan negara anggotanya.

Bentuk kerjasama tersebut di mulai dari persetujuan kontrak pembelian atau penjualan senjata baik dari Indonesia maupun dari negara anggota aktif *North Atlantic Treaty Organization* termasuk latihan militer gabungan, pertukaran informasi intelijen, hingga pengadaan alutsista yang memadai bahkan adanya kerjasama penanggulangan Terorisme membuat negara Indonesia dapat menjalin hubungan erat dengan aliansi militer terutama pada *North Atlantic Treaty Organization* dalam kepentingan dari antar negara.

Maka untuk menjalin hubungan tersebut memerlukan diplomasi militer yang erat sebagai delegasi Indonesia kepada negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* di mana menjadi alat penting dalam kerjasama diantaranya di tengah situasi kebijakan politik bebas aktif tetap di jalankan, serta bagaimana perwakilan dari Indonesia dapat melakukan kunjungan resmi negara untuk sebuah pertemuan bilateral sekaligus partisipasi forum internasional yang membahas isu-isu keamanan terutama pada kekuatan militer Indonesia yang menjadi pertama untuk regional Asia Tenggara dan ke-13 di dunia (Global Fire Power, 2025).

Status Amerika Serikat dalam hubungan bidang pertahanan memiliki kompleksitas dinamika politik berdasarkan kepentingan nasional maka memerlukan praktik *Military Statecraft* berlandaskan dengan *hard power diplomacy* atau hubungan diplomasi pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang tidak jauh dari adanya potensi koersif kontra produktif di antara keberlangsungan kerja sama dikarenakan adanya dua indikator seperti instrumen koersif hingga penggunaan kekuatan militer bersenjata (Wiswayana, W. M. ,2023).

Dimulai dengan diplomasi koersif sebagai pendekatan alternatif secara rasional daripada menggunakan kekuatan bersifat tradisional, maksud dari diplomasi koersif yang bersifat non-intervensi diperlukan memalui cara mempengaruhi kebijakan dari negara lain untuk mematuhi atau mengikuti kebijakan dari negara tersebut (Wolfley, 2021) sehingga memicunya sebuah negara dapat melakukan eksploitasi potensial kekuatannya melalui mengedepankan sisi diplomasi militer dan metode yang sering di gunakan ialah cara melakukan ancaman sanksi kepada negara target (Crystal, 2015).

Seperti contoh kasusnya pada penggunaan Undang-Undang *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) dari Amerika Serikat yang di sahkan oleh parlemen kongres di tahun 2017 sebagai instrumen diplomasi koersif yang di tunjukan kepada negara mitra pertahanan Amerika Serikat baik di dalam negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* maupun di luar dari itu

memiliki hubungan dengan negara yang masuk daftar potensi musuh negara dari Amerika Serikat termasuk pada nasib Indonesia yang memiliki hubungan bilateral dengan Rusia dan Tiongkok (Wezeman, 2019):

Tabel 1. Negara Ekspor Alutsista ke Indonesia Tahun 2020–2021

Ekspor	2020	2021	Total
Amerika Serikat (AS)	88	91	179
Korea Selatan	6	151	157
Perancis	48	23	71
Swiss	61	—	61
Total Keseluruhan	203	265	468

Sumber: SIPRI Trade Register (2022)

Tabel 2. Daftar Pengadaan Alutsista Indonesia dari Amerika Serikat

Recipient (R) / Supplier (S)	Jumlah Order	Nama Senjata	Deskripsi Senjata	Tahun Order	Tahun Pengiriman	Jumlah Dikirim
R: Indonesia / S: Amerika Serikat	18	C13	Mesin Diesel	2019	—	1
	6	F404	Turbofan	—	2021	1
	76	CT7	Turboprop ASW Sonar	1990	1993–2019	54
	2	HELRAZ	2014	2019–2020	—	2
	160	F414	Turbofan	2016	—	—
	20	6V-53	Mesin Diesel	2017	2020	20
	16	AAQ-33 Sniper	Sistem EO Pesawat Misil	2017	2019–2021	12
	36	AIM-120C AMRAAM	Pengunci Radar Misil	2017	2019–2020	36
	200	AIM-120C AMRAAM	Pengunci Radar Radar	2017	2020–2021	200
	2	MPQ-64 Sentinel	Pencarian Udara	2017	2020–2021	2
	9	Bell-412	Helikopter	2018	2020–2021	5
	6	ScanEagle	UAV / Drone	2018	2021	3
	5	C-130J Hercules	Pesawat Kargo / Angkut	2019	—	—
	23	ISC	Mesin Diesel	2019	2021	5

8	ScanEagle	UAV / Drone	2019	–	–
4	Bell-505 Jet Ranger	Helikopter Ringan	2020	2021	2

Sumber: SIPRI Trade Register (2022); Wiswayana, W. M. (2023)

Indonesia saat tahun 2017 berencana ingin mengadakan peningkatan pesawat tempur Su-35S dari Rusia dan di tahun yang sama di batalkan seiring dengan pengumuman memilih F-15EX sebagai alternatif terbaru dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang mendeklarasikan keterangan resmi bahwa Indonesia mengakhiri hingga tidak memiliki kepentingan lagi dalam transaksi pesawat Sukhoi tersebut (Saballa, 2021), dan tentu Indonesia melanjutkan kerjasama pertahanan dari peralatan militer atau alutsista Amerika Serikat secara kontekstual kemitraan strategis dalam aspek keamanan untuk Indonesia sebagai negara netral dengan prinsip politik bebas aktif (Wiswayana, W. M. ,2023).

Bentuk-bentuk Kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin Organisasi Pakta Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* ini terdiri transfer senjata atau alutsista baik transaksi langsung maupun hibah seperti sangkutan pemberian alutsista dalam upaya kerjasama kedua negara dengan pembangunan fisik *Minimum Essential Force* (MEF), dari sumber *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) bagian Arms Transfer Database tahun 2022 yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat menempati urutan pertama sebagai negara yang melakukan eksportir alutsista sebesar 179 juta *Trend-Indicator Values* (TIV) kepada Indonesia selama 2 tahun di mana riset ini merupakan nilai refleksi indeks kapabilitas militer dan tidak diperuntukkan sebagai nilai pembayaran riil (Hottom, 2012).

Dari bukti data tersebut menunjukkan bahwa posisi Amerika Serikat mempertahankan urutan pertama dari berbagai negara dalam eksportir persenjataan bagi kebutuhan pembangunan MEF khusus Indonesia yang dapat di percaya mencerminkan kerjasama kedua negara dengan aspek pertahanan meningkat sehingga baik Indonesia maupun Amerika Serikat berpotensi pengadaan nilai kontrak sebesar 1,88 juta USD dalam bentuk penjualan aktor negara ke negara di bawah naungan program Foreign Military Sales (FMS) termasuk bantuan pemberian secara langsung sebesar 14 juta USD berdasarkan dari *Foreign Military Financing* (FMF) pada tahun 2020 (U.S. Department of State, 2021).

Selain pengadaan kerjasama transaksi terdapat adanya kegiatan latihan gabungan militer bersama atau di kenal sebagai *Joint exercise* dalam lingkup kerja manifestasi diplomasi militer yang di selenggarakan menyesuaikan spesifikasi elemen angkatan militer di mulai dari angkatan darat, angkatan laut, hingga angkatan udara di mana penyesuaian ini dapat membuat personel militer untuk Indonesia bersama Amerika Serikat mengembangkan bersama dari sisi kemampuan tempur atau taktis yang sesuai untuk kebutuhan elemen masing-masing (U.S. Embassy Jakarta, 2021).

Dalam keuntungan agenda latihan gabungan ini memiliki refleksi peningkatan kapabilitas pertahanan di sertai dengan penyatuan visi dan misi untuk menghadapi potensi ancaman apa pun dari sudut pandang negara Indonesia dan Amerika Serikat seperti latihan rutin tahunan *Garuda Shield* beserta rangkaian aktivitas pelatihan taktis, pengadaan workshop akademi militer, hingga penguatan institusi dan di sisi kelautan adanya latihan rutin *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) yang mengakomodir kegiatan pelatihan meningkatkan kapabilitas kemampuan menyelam, latihan medis, penerbangan bersama informasi aviasi, hingga membangun kekuatan kesadaran maritim (U.S. Embassy Jakarta, 2021).

Untuk status Perancis sebagai negara anggota Organisasi Pakta Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* telah berkerja sama dengan Indonesia sejak tahun 1950 an sampai sekarang termasuk dengan adanya *Letter of Intent* (LoI) yang berisikan tentang peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Perancis yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Republik Perancis Jean-Yves Le Drian, isian kerjasama pertahanan militer mencakup kesepakatan kedua negara dalam memajukan diplomasi militer yang saling menguntungkan pada lingkup *Indonesia-France Defence Dialogue* (IFDD) serta forum pertemuan dialog diplomasi pertahanan antara Indonesia-Perancis pada tahun 2017 dalam tindak lanjut kesepakatan *Letter of Intent* di mana pertemuan tersebut di hadiri oleh delegasi Indonesia seperti Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Direktur Kerjasama Internasional

termasuk Brigjen TNI Rizerius Eko Hadi Sancoko serta dari delegasi Perancis oleh Guillaume de Garidel sebagai perwakilan International *Directorate-DGA of the Republic of France RDML* (Rani Mardhika et al, 2023).

Pada Januari 2020 pertemuan diplomasi militer antara Indonesia-Perancis berlanjut pada masa era Menteri Pertahanan H. Prabowo Subianto dengan kunjungan ke kantor Kementerian Pertahanan Perancis Florence Parly dalam memperingati hubungan diplomatik yang ke-70 untuk membahas cara-cara memperkuat kerjasama pertahanan Indonesia-Perancis termasuk masuknya produksi senjata buatan Indonesia ke dalam pasok alutsista global atau *Global Amry Trade*, pada bulan Juni 2021 pertemuan kedua kalinya kedua Menteri Pertahanan dari dua negara atas undangan dari delegasi Perancis dalam *Indonesia-France Defence Cooperation Agreement* (DCA) dengan mendatangani kesepakatan baik untuk kedua Menteri Pertahanan beserta perwakilan Indonesia seperti Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Armanatha Nasir, Atase Pertahanan bersama Asisten Khusus Menteri Pertahanan di Kantor Pertahanan Perancis di mana tujuan perjanjian ini mempererat kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Perancis dalam bidang pendidikan militer, Kursus pengetahuan dan teknologi militer, Kerjasama pasukan perdamaian, penanganan ancaman terorisme, hingga pertumbuhan beserta penelitian industri militer secara bersama (Kemlu RI, 2021).

Isi dari *Indonesia-France Defence Cooperation Agreement* (DCA) antara Indonesia dengan Perancis yakni (1) Perjanjian transaksi beli antara Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabarahanan Kemhan) dengan perusahaan aviasi Perancis *Dassault Aviation* untuk pembelian 6 pesawat tempur *Dassault Rafale* sekaligus tahap awal perjanjian selanjutnya, (2) Perjanjian kerjasama PT. Pindad dengan *Nexter Munition* untuk produksi amunisi kaliber besar, (3) 3 perjanjian besar dari *Memorandum of Understanding* (MoU) seperti industri telekomunikasi antara PT. Lembaga Elektronika Nasional dengan perusahaan teknologi Perancis Thales Group, bidang maritim dan pengembangan kapal selam dari perwakilan PT. PAL dengan perusahaan maritim *Perancis Naval Group*, hingga kerjasama PT. Dirgantara Indonesia dengan *Dassault Aviation* dalam cakupan Program Offset and Transfer of Technology (Rani Mardhika et al, 2023).

Isian dari persetujuan kerjasama dalam *Indonesia-France Defence Cooperation Agreement* (DCA) menggunakan pemahaman istilah *Balance of Power* yang merupakan satu strategi atau sebuah sistem yang mampu sebagai pertahanan kondisi keamanan yang stabil tanpa harus berhadapan dengan agresi ataupun terseret kepada peristiwa perang sebagaimana menjadi permasalahan politik Internasional, hal tersebut di perlukan adanya kondisional dari (1) sebuah negara memiliki komunitas yang membangun hubungan diplomatik beserta persamaan pandangan yang menentukan arah mekanisme keseimbangan terhadap hegemoni tertentu sehingga sebuah contoh pengadaan pesawat *Dassault Rafale* beserta kesepakatan kerjasama lainnya merupakan bagian dari *Indonesia-France Defence Cooperation Agreement* (DCA) yang dapat mewujudkan perkembangan sikap saling percaya satu sama lain antar negara yang berdampak pada peningkatan kekuatan pertahanan negara terutama pada sistem pertahanan udara untuk pertahanan Indonesia tersendiri (Rani Mardhika et al, 2023).

KESIMPULAN

Kerjasama Indonesia dengan negara anggota Organisasi Pakta Atlantik Utara atau di kenal sebagai *North Atlantic Treaty Organization* dalam perdagangan senjata dunia telah di lakukan sejak Indonesia merdeka di mana peran Amerika Serikat membantu hak kemerdekaan dari menekan Belanda untuk menghentikan kedua agresi militer Belanda sampai pada masa modern dengan memegang prinsip politik bebas aktif dan Indonesia memiliki posisi strategis di Asia Tenggara sebagai negara terkuat di regional ASEAN yang dapat di percaya oleh negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* terutama Amerika Serikat serta Perancis pada partisipasi menjaga keamanan dan stabilitas regional baik untuk Asia Tenggara Maupun Asia Pasifik. Sejarah kerjasama Indonesia dengan NATO dapat ditelusuri kembali ke era Perang Dingin pasca kemerdekaan di mana Indonesia berusaha menyeimbangkan hubungan dengan kedua blok besar yakni Barat dari Amerika Serikat dan Timur dari Uni Soviet, melalui diplomasi militer bahwa Indonesia mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet yang membantu memperkuat kemampuan pertahanan negara yang membuat kerjasama ini mencerminkan kebutuhan Indonesia untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya di tengah ancaman yang ada.

Dengan kedua kerjasama ini menghasilkan kesepakatan secara *Memorandum of Understanding* baik Indonesia dengan negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* melalui serangkaian transfer

teknologi, pembelian yang telah di sepakati oleh negara produsen, hingga peran Indonesia dalam mengadakan pelatihan bersama seperti *Garuda Shield* sampai CARAT di tahun 2021 yang bertujuan agar diplomasi militer Indonesia kepada *North Atlantic Treaty Organization* melalui negara anggota mendapatkan citra terbaik kepada dunia dalam catatan bahwa Indonesia tetap menganut politik bebas aktif dan tidak bergabung dengan aliansi militer manapun sehingga Indonesia mampu mengadakan peningkatan alusista negara yang dapat dipercaya oleh negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* terutama negara yang memproduksi persenjataan dalam persetujuan pembelian hingga kerjasama diplomasi militer lainnya.

DAFTAR PUSAKA

Anderton, C. H. (1995). Economics of arms trade. *Handbook of defense economics*, 1, 523-561.

Ar-Rasyid, T. P., & Wiswayana, W. M. (2023). Upaya Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Dalam Mencapai Target Minimum Essential Force. *JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI*, 8(1), 140–158. Retrieved from <https://jurnal.kemlu.go.id/jurnal-hublu/article/view/9>

Crystal, S. (2015). Coercive Diplomacy : A Theoretical and Practical Evaluation. *Glendon Journal of International Studies*, 8(1), 1–29. <http://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/view/38941/3630>

Drab, L. (2018). Defence diplomacy – an important tool for the implementation of foreign policy and security of the state. *Security and Defence Quarterly*, 20(3), 57–71. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5152>

Global Fire Power. (2025). 2025 Military Strength Ranking. <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>

Global Fire Power. (2025). Southeast Asian Military Powers Ranked (2025). <https://www.globalfirepower.com/countries-listing-southeast-asia.php>

Hottom, P. (2012). Measuring International Arms Transfers. SIPRI Fact Sheet, 1–2.

Kemhan RI. (2020). “Kunker Menhan RI ke Perancis, Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI.”. <https://www.kemhan.go.id/2020/01/13/kunker-menhan-ri-ke-perancis-tandai-70-tahun-hubungandiplomatik-ri-perancis.html>

Kemlu RI. 2021. “Indonesia dan Prancis Tandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan,” <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2648/berita/indonesia-dan-prancis-tandatangani-persetujuan-kerjasama-pertahanan>

Levine, Paul & Smith, Ron, 1995. "The Arms Trade and Arms Control," *Economic Journal*, Royal Economic Society, vol. 105(429), pages 471-484, March.

Major Richard W. B. Hutton. (2018). Jakarta Knows Best: US Defense Policies and Security Cooperation in 1950s Indonesia. U.S. Army Command and General Staff College. ATTN: ATZL-SWD-GD. Fort Leavenworth, KS 66027-2301

Mohamad Rosyidin (2019). Metodologi penelitian hubungan internasional / Mohamad Rosyidin.

North Atlantic Treaty Organization. (29 June 2022). *NATO 2020 STRATEGIC CONCEPT* : Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Madrid.

Patricia Kimball, Nathan O'Hara, Isaiah Quinby.(2024). Allies, Partners, and Prospects: Global Perspectives on the Indo-Pacific. The Henry M. Jackson School of International Studies Task Force Report 2024. University of Washington.

Rani Mardhika, de Fretes, C. H. J., & Simanjuntak, T. R. (2023). Kepentingan Indonesia dalam Hubungan Kerja Sama Pertahanan Indonesia – Perancis : (Studi Kasus: Pembelian Pesawat Tempur Dassault Rafale Tahun 2020 – 2022). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(04), 43–55. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i04.757>

Reni Susanti. 2015. “Kalahkan Eropa dan AS, Senjata Pindad diburu Lima Negara”. *Kompas*.

SIPRI. (2022). Arms Transfer Database 2020-2021. Diakses pada 23 Januari 2025.

SIPRI. (2022). Trade Register 2020-2021: Transfer of Major Weapons from U.S. to Indonesia. Diakses pada 23 Januari 2025.

Sutrimo Sumarlan, Pujo Widodo, Ferry Valdano Akbar. (2019). Kebijakan Politik Penjualan Senjata Api Kecil & Ringan Indonesia dalam Perdagangan Senjata Global. *Jurnal Industri Pertahanan*, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/IP/article/view/456/JIPV1N1>

U.S. Arms Control and Disarmament Agency [producer], 1995. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 1995. <http://doi.org/10.3886/ICPSR06516.v1>

U.S. Arms Control and Disarmament Agency. WORLD MILITARY EXPENDITURES AND ARMS TRANSFERS, 1983-1993. Washington, DC:

U.S. Department of State. (2021). U.S. Security Cooperation with Indonesia. Bureau of Political-Military Affairs. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-indonesia/>

U.S. Embassy Jakarta. (2021). U.S. and Indonesia Strengthen Partnership with Garuda Shield 2021 Military Exercise. Press Releases. <https://id.usembassy.gov/u-s-and-indonesia-strengthen-partnership-with-garuda-shield-2021-military-exercise/>

U.S. Embassy Jakarta. (2021). U.S., Indonesia Commence Bilateral Maritime Exercise CARAT Indonesia. Press Releases. <https://id.usembassy.gov/u-s-indonesia-commence-bilateral-maritime-exercise-carat-indonesia/>

United States Arms Control and Disarmament Agency. (2000). World Military Expenditures and Arms Transfers 1998 [Fact sheet]. U.S. Department of State, Bureau of Verification and Compliance.

Van Lieshout, J., Beeres, R. (2022). Economics of Arms Trade: What Do We Know?. In: Beeres, R., Bertrand, R., Klomp, J., Timmermans, J., Voetelink, J. (eds) NL ARMS Netherlands Annual Review of Military Studies 2021. NL ARMS. T.M.C. Asser Press, The Hague. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-471-6_2

Wezeman, S. T. (2019). Arms Flows to South East Asia. Stockholm International Peace Research Institute, 1(1), 61.